

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kebebasan dan kemerdekaan warga negara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 (Sesudah Amandemen) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*”.¹ Selain itu ada ciri lain negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum. Dengan adanya pemilu warga negara diharapkan mampu memilih calon ataupun partai yang dikehendaki tanpa paksaan. Di Indonesia sendiri warga negaranya cenderung heterogen, pemilu merupakan solusi untuk mengakomodir suara setiap warga negara.

Menurut Mulyosudarmo pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai “Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.²

Negara yang memiliki kualitas demokrasi yang baik tentunya terdapat indikator. Indikator negara demokrasi yang berkualitas adalah bagaimana partisipasi politik dan perilaku pemilih bekerja. Kecenderungan seorang pemilih dalam pemilu disebut perilaku pemilih, dan hal itulah yang membuat kualitas demokrasi negara dapat dinilai. Perilaku pemilih sangat mempengaruhi hasil

¹ Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Pasal 1 Ayat 2

² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nakwasara)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hlm. 8.

pemilih. Keberadaan pemilih dengan seluruh latar belakang yang dimiliki pemilih tentunya juga sangat berpengaruh.

Perilaku pemilih dalam memilih kandidat untuk mengisi jabatan politik tentunya dipengaruhi oleh pandangannya terhadap partai politik. Selain itu latar belakang pendidikan, umur, hingga agama pun sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Kita mengenal teori politik yang dikemukakan oleh Clifford Geertz melalui bukunya yang berjudul *The Religion of Java*, yang akhirnya dialih bahasakan menjadi *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (1983). Dari buku tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang agama mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih partai.³

Sejalan dengan pernyataan Lazarsfeld menjelaskan bahwa setiap seorang pemilih hidup dan memiliki karakteristik sosial tertentu seperti: status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaannya, usianya, akan mendefinisikan bahwa lingkaran sosial yang akan mempengaruhi perilaku dan keputusan memilih seseorang karena setiap individu memiliki lingkaran sosial yang mempunyai norma tersendiri, aturan-aturan yang mengatur hidup komunitas mereka. Maka, kontrol atas perilaku individu dengan cara memberikan tekanan maka individu akan menyesuaikan diri tanpa harus bersitegang dengan lingkarannya.⁴

Program-program yang dirancang dan disosialisasikan oleh partai politik juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Keberadaan kandidat yang masuk dalam bursa pemilihan sekaligus yang diusung partai politik juga tak dapat dilepaskan dari hal yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Banyak partai yang berlomba-lomba dalam meraih hati rakyat. Dalam kasus kontestasi politik lokal, partai berusaha membangun kekuatan atau basis massa hingga wilayah terkecil dalam pemerintahan. Hal itu didapati agar partai politik dapat mendominasi suatu wilayah sehingga dapat memberikan sumbang sih suara dalam kontestasi politik nasional.

³ Aswab Mahasin, *Abangan, santri, priyayi dalam masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981)

⁴ Paul Lazarsfeld, *The People's Choice*, (New York: Colombia University Press, 1944), hlm. 23-24

Dalam perkembangan politik di Indonesia banyak bermunculan partai politik, terlebih setelah reformasi. Orde baru yang sebelumnya berusaha melemahkan kekuatan partai politik dengan kebijakan fusi partai politik, akhirnya berakhir dan membuat pertumbuhan partai politik era reformasi menjadi semakin masif. Masih banyak partai politik yang sampai sekarang masih bertahan dibawah terpaan pengaruh orde baru kala itu. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mampu bertahan sampai sekarang. Partai dengan lambang banteng ini merupakan partai yang memiliki idealisme yang sama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam tesis yang ditulis Erlan (2010) "*Pergulatan PDI Perjuangan Dalam Menghadapi Neoliberalisme*" menyatakan sejarah lahirnya PDI terjadi pada 10 Januari 1973, hasil fusi partai oleh Presiden Soeharto, yang menggabungkan 5 partai Era Soekarno.⁵

Periode PDI dari tahun 1973 hingga 1998 menjadi fondasi dalam terbentuknya PDI-P yang kemudian terbentuk pada tahun 1998 dalam konferensi di Bali. Dari sejarah tersebut PDI-P menjadi partai pewaris nilai-nilai Soekarno yang oleh pemerintah kemudian dicoba untuk menghilangkan politik dinasti dari keturunan Soekarno. Maka Usaha tersebut kemudian menyebabkan konflik internal dalam tubuh PDI, yang setelah Musyawarah Luar Biasa di Bali pada tahun 1998, maka terpilihlah Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum PDI-P yang dibentuk terlepas dari struktur PDI kala itu. Hingga kini, setelah masa reformasi PDI-P tetap menjadi partai yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan nasional, dan merambah ke daerah semenjak otonomi daerah pasca orde baru mulai merevitalisasi potensi yang dimiliki, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah.⁶

Keberadaan PDIP tak lepas dari peran kuat Megawati, yang sekarang ini menjabat sebagai ketua umum partai. Megawati yang merupakan trah langsung Soekarno memiliki kharisma sangat kuat sehingga mampu menggaet pengikut yang

⁵ Herlan, "*Pergulatan PDI Perjuangan Dalam Menghadapi Neoliberalisme: Studi Kasus pada Penyusunan Undang-Undang tentang Penanaman Modal*", (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, 2010), hlm. 10

⁶ Alfian Taufiq, "*Dominasi PDI-P di Kota Blitar Tahun 1999-2014*", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 2

memiliki loyalitas luar biasa. Figur Megawati menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan partai politik di Indonesia terhadap aktor politik sentral sangatlah kuat. Sebagai contoh adalah Partai Demokrat dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Gerakan Rakyat Indonesia dengan figur Prabowo Subianto. Beberapa figur kuat dibalik sebuah partai setidaknya memiliki dua kekuatan. Pertama karisma figur, dalam mengumpulkan pendukung seorang pemimpin membutuhkan karisma atau pengaruh yang mampu menarik perhatian calon pendukung. Memang ukuran karisma tidak dapat diukur dengan angka, karena ini merupakan subjektifitas tiap individu. Setiap individu memiliki definisi sendiri misalnya figur karisma dengan pertimbangan ketika ia berorasi di depan orang banyak atau dengan pertimbangan pengalaman kepemimpinannya. Kedua kekuatan finansial, dalam pembuatan dan pengembangan sebuah partai tentunya memerlukan biaya yang banyak. Tokoh pemimpin harus memiliki kekuatan finansial yang mampu membiayai operasional suatu partai.

Keberadaan kekuatan PDIP di tingkat daerah khususnya Kabupaten Kulon Progo terlihat pada 10 tahun terakhir ini. Bisa dibilang daerah ini merupakan basis massa PDIP semenjak reformasi. Megawati yang merupakan ketua umum partai juga memiliki pengaruh, khususnya dalam penentuan calon yang akan diusung partai dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Pada tabel 1 dapat ditunjukkan bahwa calon Hasto Wardoyo yang diusung PDIP memenangkan Pilkada pada tahun 2011 dan 2017, dan tampak jelas bahwa kemenangan telak yang didapat pasangan yang diusung PDIP ini.

Tabel 1. Perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2011 dan 2017

No	Tahun Pilbup	Nama Paslon	Jumlah Suara	Presentase
1	2011	Drs. Sarwidi-Hartikah, S.Ag	13.272	6%
		Drs. H. Mulyono-H.Ahmad Sumiyanto, SE, Msi	67.125	29%
		Drs. Suprpta-Drs. H. So'im, MM	42.516	19%

No	Tahun Pilbup	Nama Paslon	Jumlah Suara	Presentase
		dr. H. Hasto Wardoyo-Drs. H. Sutedjo	105.965	46%
2	2017	Drs. H. Zuhadmono Azhari, M.Pd.-BRAY. Hj. Iriani Paramstuti	36.809	14%
		dr. H. Hasto Wardoyo-Drs. H. Sutedjo	219.225	86%

Sumber: Dokumen KPUD Kulon Progo

Adapun dalam pemilihan anggota legislatif tingkat 2 pada tahun 2019 yang lalu, PDIP mendapatkan 12 kursi, yang artinya 40% kursi di DPRD dimenangkan oleh partai ini. Dikutip dari laman url <http://diy.kpu.go.id> saat rapat pleno penetapan perolehan suara partai politik dan caleg terpilih DPRD Kulon Progo, komisioner KPU Kulon Progo membacakan model E-KPU Kabupaten/Kota, model E1-DPRD Kabupaten/Kota, model E1.1-DPRD Kabupaten/Kota, model E1.2-DPRD Kabupaten/Kota, dan model E2-Kabupaten/Kota. Hasil rapat pleno penetapan tersebut, parpol yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kulon Progo yakni PDIP sebanyak 12 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi, PKS, PKB, dan Partai Golkar masing-masing 5 kursi, serta Partai NasDem sebanyak 1 kursi. Dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi, tetapi dalam catatan kejadian dituliskan mengenai beberapa parpol yang tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dana kampanye. Setelah selesai pembacaan oleh komisioner, kemudian penandatanganan berita acara oleh saksi dan perwakilan dari partai politik.

Memang Kabupaten Kulon Progo didominasi pemilih tradisional jika dilihat dari segi asal pendidikan politiknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sukmawati di Kecamatan Bugel, bahwa penanaman nilai-nilai politik melalui keluarga kebanyakan dilakukan secara tidak sengaja. Orang tua maupun anggota

keluarga lainnya bertindak sebagai contoh bagi anak-anak.⁷ Maka secara tidak langsung pengaruh dari orang tua setidaknya akan mempengaruhi keputusan pemberian suara anaknya.

Namun jika dilihat dari fenomena akhir-akhir ini, dimana sentimen negatif publik terhadap figur Megawati dan PDIP yang meningkat. Membuat pemilih menyoroti setiap tindakan dan kebijakan PDIP, yang berimbas pada perolehan suara PDIP baik ditingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2020 terjadi sebuah anomali dimana PDIP mengalami kekalahan pada Pemilihan Bupati Kabupaten Blitar. Bisa dibayangkan Kabupaten Blitar merupakan lumbung suara PDIP, namun mengalami kekalahan. Hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2015 ketika Pilkada di Kabupaten Sleman dan Bantul, PDIP juga mengalami kekalahan dikandang sendiri. Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, terjadi pergeseran kecenderungan pemilih. Apabila dihubungkan antara pergeseran kecenderungan pemilih terhadap sentimen negatif akhir-akhir ini, bisa dibayangkan masuk akal jika hal ini terjadi.

Pemilih pada kalangan Generasi Z yang didominasi pemilih pemula tentunya bisa dianggap faktor anomali pergeseran perilaku pemilih. Bisa saja suatu daerah yang didominasi pemilih tradisional, nantinya berubah menjadi pemilih kritis, ataupun sebaliknya. Pemilih Generasi Z unggul dalam memperoleh informasi, khususnya informasi politik. Hal ini terjadi karena Generasi Z sudah sangat terbiasa dengan teknologi. Mendapatkan informasi melalui media sosial menjadi suatu hal lumrah bagi Generasi Z. Terdapat penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku pemilih. Didapati bahwa media sosial berpengaruh terhadap perilaku pemilih pemula sebesar 46,80%.⁸ Pada tahun 2024 nanti, sekitar 60% akan didominasi pemilih Generasi Milenial dan Generasi

⁷ Sukmawati Martani et al., "Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dan Sosialisasi Politik Dalam Keluarga Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kalurahan Bugel Kabupaten Kulon Progo", *Jurnal Mahasiswa PPKn*, Vol. 11 No.2 (Juni, 2022), hlm. 234

⁸ Muhammad Arif, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Barru", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Z.⁹ Hasil yang dari survei CSIS ini menunjukkan bahwa generasi Z memiliki peran penting dalam proses demokrasi. Keberadaan generasi Z tentunya perlu diperhatikan, khususnya partai politik guna menampung suara miliknya.

Pengamat Politik dari *Global Studies Northwestern University* menyebut pengaruh orangtua terhadap pilihan politik Generasi Z cukup dominan. Hal serupa juga muncul dari lembaga survei Charta Politika Indonesia. Generasi Z di Indonesia sering dianggap sebagai remaja yang lugu terhadap situasi dinamika politik. Tidak heran dua lembaga tersebut memunculkan pendapat demikian. Padahal, Gen Z memiliki cara berpolitik yang berbeda dari gaya politik yang dianut oleh kakek-nenek bahkan orang tua mereka sendiri. Mungkin survei itu cocok untuk menggambarkan angkatan pertama dan kedua generasi Z di Indonesia, namun ini akan berkembang, angkatan selanjutnya sangat bisa saja terjadi perubahan. Pertimbangannya adalah mereka adalah generasi paling terpapar oleh teknologi, hal ini membuat mereka adalah generasi yang menganggap teknologi yang dianggap oleh generasi sebelumnya luar biasa menjadi biasa.¹⁰ Dengan adanya beberapa faktor seperti ini, yang membuat terjadinya sebuah anomali. Dimana sebuah partai bisa mengalami kekalahan dikandang sendiri akibat tidak menyadari pergeseran perilaku pemilih, khususnya pemilih Generasi Z.

Selain pandangan dari Generasi Z yang merupakan pemilih, yang memiliki pandangan berbeda dibanding generasi sebelumnya. Keberadaan figur ketua umum partai juga sangat berpengaruh pada pemilih itu sendiri. Menurut hipotesis peneliti, figur ketua umum sebuah partai yang kuat sangat berpengaruh pada perilaku memilih, tentunya dengan berbagai faktor penunjang lainnya. Lihat gambar 1 konsep peneliti. Peneliti melihat bahwa figur ketum memiliki pengaruh besar pada perilaku pemilih pada Generasi Z. Namun, peneliti belum bisa mendefinisikan

⁹ Benedikta Ave, 2022, *Survei CSIS: Pemilu 2024 Diisi Hampir 60 Persen Generasi Z dan Milenial*, <https://www.liputan6.com/news/read/5080449/survei-csis-pemilu-2024-diisi-hampir-60-persen-generasi-z-dan-milenial>, 21 September 2022 (19:59)

¹⁰ Arief Rakhman, "Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z", *Jisip-Unja*, Vol.3 No.1, (Desember, 2019), hlm.32

pengaruh figur ketum apakah bersifat positif dan negatif. Selain itu peneliti belum bisa melakukan pemetaan mengenai tipe perilaku pemilih pada Generasi Z.



Gambar 1. Konsep Peneliti

Berangkat dari latar belakang dan hipotesis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap perilaku pemilih Generasi Z di Kabupaten Kulon Progo dengan judul **“PENGARUH KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP PERILAKU PEMILIH GENERASI Z DI KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan landasan latar belakang yang telah dijabarkan, kami telah menganalisis masalah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pemilih Generasi Z terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?
2. Bagaimana perilaku pemilih pemula di Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah terdapat pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap perilaku pemilih pemula?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Subjek sasaran adalah pemilih Generasi Z, dengan rentang umur 17-20 tahun. Data berdasarkan daftar pemilih berkelanjutan.

2. Nilai populasi diambil dari jumlah daftar pemilih berkelanjutan. Sedangkan jumlah sampel akan diperjelas pada bab selanjutnya.
3. Responden dipetakan berdasarkan sistem zonasi sekolah.
4. Data Geopolitik diambil dari KPUD dan BPS Kabupaten Kulon Progo.
5. Pembahasan berfokus pada pengaruh ketua umum PDIP terhadap perilaku pemilih Generasi Z di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan latar belakang, dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada adalah: *Pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap perilaku pemilih Generasi Z di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.*

1.4 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan Informasi pada publik khususnya masyarakat Kulon Progo mengenai pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) terhadap perilaku pemilih pemula.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk setiap partai dalam mengatur strategi kampanye pada kontestasi politik selanjutnya.
- c. Memberikan data untuk pengembangan penelitian mengenai pengaruh ketua umum partai terhadap perilaku pemilih, agar bisa dikembangkan lebih baik lagi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Empiris

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah dan melengkapi perbendaharaan tulisan dan sumbangan pemikiran agar penelitian berikutnya, yang diharapkan dapat dikembangkan secara lebih komprehensif. Terutama mengenai topik yang dijelaskan mengenai pengaruh ketua umum partai terhadap perilaku pemilih. Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap partai memiliki strategi dalam berkampanye karena sudah mengetahui perilaku pemilih itu sendiri.

b. Secara Teori

Secara teori penelitian ini berfokus pada perubahan pengaruh ketua umum partai terhadap perilaku pemilih. Data penelitian ini nantinya akan berfungsi sebagai data untuk mengetahui perilaku pemilih pemula apakah terjadi perubahan atau tidak.